

Kebijakan Desentralisasi Fiskal, Pergeseran Sektoral, dan Ketimpangan
Antarkabupaten/Kota di Sulawesi Tengah
*Fiscal Decentralization Policies, Sectoral Shifts and Inequalities Amongst
Regencies/Municipalities in Central Sulawesi*

Muhammad Amir Arham^{a,*}

^aDepartemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo

Abstract

Fiscal decentralization can create efficiency and effectiveness to promote growth and change in economic structures well as to reduce inequalities amongst regions. This study intends to find out whether the fiscal decentralization policies during 2001–2010 contribute to the shift of economic sectors and inequality rates amongst district/municipalities in the Province of Central Sulawesi. By using econometrics method to analyze panel data, the study found that fiscal decentralization supports a shift in the economic sector where the role of primary sector gradually decreased and the secondary and tertiary sector tend to be increased since the implementation of regional autonomy. As a result, the fiscal decentralization produces an economic change in Central Sulawesi. At the same time, during this study period, it shows that fiscal decentralization can generate an economic inequality amongst regencies/municipalities in the region.

Keywords: Fiscal Decentralization, Sectoral Shifts, Inequality

Abstrak

Desentralisasi fiskal dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas untuk mendorong pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi, serta mengurangi ketimpangan antardaerah. Studi ini ingin mengetahui pengaruh kebijakan desentralisasi fiskal terhadap pergeseran sektor dan ketimpangan antarkabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan menggunakan metode ekonometrika melalui persamaan data panel pada periode tahun 2001–2010, studi ini menemukan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal dapat mendorong pergeseran sektor, di mana peranan sektor primer kecenderungannya makin menurun, sehingga berakibat pada peningkatan peranan sektor sekunder dan tersier selama pelaksanaan otonomi daerah, dengan demikian kebijakan desentralisasi fiskal dapat menciptakan perubahan struktur ekonomi di Sulawesi Tengah. Kebijakan desentralisasi fiskal mendorong terjadinya peningkatan ketimpangan antara kabupaten/kota di Sulawesi Tengah selama periode studi.

Kata kunci: Desentralisasi Fiskal, Pergeseran Sektoral, Ketimpangan

JEL classifications: E62, R11, R12

Pendahuluan

Desentralisasi prinsipnya memberikan kewenangan yang besar kepada pemerintah daerah untuk dapat memecahkan masalah-masalah

pembangunan di daerah, sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi (Oates, 1972). Implikasi lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi diharapkan mendorong terjadinya perubahan struktur perekonomian yang ditandai dengan terjadinya pergeseran struktur pekerjaan secara sektoral, perubahan komposisi sektoral da-

*Alamat Korespondensi: Jalan Sudirman No. 6, Kota Gorontalo *E-mail:* amier_archam@yahoo.com.

lam *regional income*, distribusi dan pemerataan pendapatan, maupun perubahan struktur permintaan domestik. Namun, kelihatannya selama pelaksanaan desentralisasi fiskal, efek pertumbuhan dan kemajuan ekonomi lebih kuat di daerah yang kaya Sumber Daya Alam (SDA) sebagaimana yang ditemukan oleh Waluyo (2007), bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia lebih kuat pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah industri dan daerah yang kaya SDA. Gejala yang sama ditemukan oleh Hammond dan Tossun (2011) di Amerika Serikat, bahwa desentralisasi lebih memiliki dampak terhadap daerah pusat industri dan jasa, namun tidak signifikan bagi daerah nonmetropolitan.

Berdasarkan temuan empiris tersebut di atas dikaitkan dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal di Sulawesi Tengah, kelihatan kondisinya sangat kontras, meskipun kekayaan SDA (pertanian dan pertambangan) cukup merata. Potensi pertanian menyebar di semua kabupaten, sementara potensi perikanan berada di tiga kawasan, yakni Laut Sulawesi, Teluk Tomini, dan Teluk Tolo. Potensi migas dan mineral di wilayah timur Sulawesi Tengah (Kabupaten Banggai dan Kabupaten Morowali), demikian juga di wilayah pantai barat Sulawesi Tengah (Kabupaten Donggala, Kabupaten Tolitoli, dan Kabupaten Buol) potensi tambang emas cukup besar. Daerah-daerah yang potensial tersebut kondisinya belum mengalami kemajuan yang signifikan, industri pengolahan belum berkembang. Sejatinya bahan baku yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk kegiatan industri, kondisi ini mengakibatkan struktur perekonomian masih bergantung pada sektor primer, belum beranjak ke sektor sekunder.

Padahal kemajuan perekonomian yang diharapkan oleh semua negara (daerah), yakni terjadinya pergeseran sektor (perubahan struktur produksi) perekonomian, yang ditandai menurunnya peranan sektor primer dan meningkatnya peranan sektor sekunder, baik dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mau-

pun dalam penyerapan tenaga kerja. Djojohadikusumo (1994) mengungkapkan bahwa perubahan struktur suatu perekonomian berkaitan dengan perubahan-perubahan pada struktur produksi, kesempatan kerja, ketimpangan antarsektoral, antarwilayah, dan antardistribusi pendapatan. Selanjutnya akan mendorong kenaikan pendapatan, sehingga mengakibatkan terjadinya pergeseran pada komposisi produk, yakni pergeseran di antara sumbangan sektoral dan pada kesempatan kerja produktif (dari sektor primer beralih ke sektor sekunder dan tersier).

Selain itu, jika struktur perekonomian daerah masih didominasi sektor primer, kecenderungannya akan terjadi ketimpangan yang cukup tinggi, sekalipun desentralisasi sudah dijalankan. Hasil studi Rodríguez-Pose dan Ezcurra (2010) memperkuat asumsi tersebut bahwa kebijakan desentralisasi di negara berkembang (terutama negara agraris) berpengaruh signifikan terhadap kenaikan ketimpangan. Nugrahanto dan Muhyiddin (2008), menemukan hasil yang tidak berbeda bahwa desentralisasi fiskal meningkatkan ketimpangan regional di Indonesia, termasuk di Sulawesi Tengah. Temuan-temuan ini tentu bertolak belakang dengan tujuan pelaksanaan desentralisasi fiskal, padahal kebijakan desentralisasi fiskal pada dasarnya adalah salah satu solusi untuk memecahkan masalah ketimpangan, karena dalam pelaksanaan desentralisasi dilakukan *intergovernmental transfer* untuk meminimalkan *vertical imbalance* dan *horizontal imbalance*. Sementara itu, tingkat ketimpangan ekonomi antarwilayah (kabupaten/kota) menurut dispersion ratio untuk setiap provinsi di wilayah Sulawesi menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah cenderung meningkat (Bappenas, 2013).

Dengan demikian, pelaksanaan desentralisasi fiskal pencapaiannya belum maksimal untuk mendorong terjadinya perubahan struktur ekonomi di daerah dan belum dapat mengoreksi masalah ketimpangan. Tidak jauh berbeda de-

ngan masalah pengelolaan sektor publik, pada tahun 2010 semua kabupaten/kota di Sulawesi Tengah tercatat terdapat 306 kasus gizi buruk (Kemenkes RI, 2010), bahkan termasuk salah satu yang tertinggi di Indonesia. Kondisi ini tidak sejalan dengan tujuan desentralisasi yang diasumsikan, justru pelayanan publik untuk kebutuhan dasar, misalnya sektor kesehatan masyarakat di daerah akan makin membaik setelah desentralisasi diimplementasikan. Kondisi ini memperkuat hasil studi Pepinsky dan Wihardja (2009) sebelumnya yang menemukan minimnya efek positif desentralisasi terhadap pembangunan di Indonesia, tidak terkecuali di Sulawesi Tengah.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal pada dasarnya diharapkan daerah otonom (kabupaten/kota) makin mandiri dalam pembiayaan pelayanan publik dan pembangunan. Atau setidaknya proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan masing-masing daerah makin meningkat setiap tahun, dan sebaliknya proporsi transfer makin menurun. Jika dikaitkan dengan kondisi ini di Sulawesi Tengah, maka upaya melakukan "big push" pembangunan yang dilakukan pemerintah adalah dengan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia No. 7 Tahun 2008 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp2 triliun sebagai konsekuensi keluarnya Inpres tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal di Sulawesi Tengah belum menunjukkan hasil yang memadai dalam hal kemandirian fiskal setiap kabupaten/kota malahan makin berharap adanya transfer dari pusat, selain dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (PKPD). Realitas ini memperkuat hasil studi Setiaji dan Adi (2007) bahwa kemandirian daerah bukan makin membaik, akan tetapi sebaliknya di mana ketergantungan daerah terhadap transfer dari pusat menjadi makin tinggi. Kendati setiap tahun secara nominal PAD seluruh kabupaten/kota meningkat, tetapi se-

bagian besar kabupaten/kota di Sulawesi Tengah proporsi PAD-nya terhadap total penerimaannya menurun. Malahan kenaikan PAD di beberapa daerah di Sulawesi Tengah selama pelaksanaan otonomi daerah cenderung menciptakan distorsi ekonomi, yang menjadi penghambat daya saing investasi karena makin banyaknya jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang dianggap membebani dunia usaha.

Investasi sangat dibutuhkan oleh kabupaten/kota karena melalui investasi kapasitas ekonomi dan kemampuan fiskal daerah dapat meningkat. Hanya saja pola daya tarik investasi di berbagai daerah begitu buruk, di mana masalah-masalah klasik penghambat seperti faktor kelembagaan dan minimnya infrastruktur masih mendominasi, belum dilakukan perbaikan. Padahal menurut Nugraheni dan Priyarsono (2012) bahwa infrastruktur secara luas dapat memicu terjadinya kegiatan ekonomi produktif di sektor-sektor lain. Akan tetapi, kenyataannya di Indonesia, terutama di Sulawesi Tengah yang wilayahnya cukup luas menunjukkan bahwa kondisi infrastruktur masih buruk dan belum mengalami perbaikan secara signifikan selama pelaksanaan desentralisasi. Jika pemerintah daerah hanya mengejar target PAD dengan memperluas basis pajak dan retribusi daerah, maka pada akhirnya PAD dapat saja meningkat tetapi kinerja perekonomian masih kurang baik. Menurut Wibowo (2004), untuk membantu mendorong pertumbuhan ekonomi atau meningkatkan kinerja ekonomi harus mempertimbangkan fakta bahwa pajak cenderung memiliki efek negatif terhadap kinerja perekonomian daerah.

Kendati banyak masalah yang timbul dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, akan tetapi kebijakan tersebut merupakan sebuah keniscayaan bagi negara besar seperti Indonesia. Hanya saja perlu berbagai perbaikan sehingga memberikan hasil yang lebih optimal pada pelaksanaan desentralisasi. Selanjutnya, makin meningkatnya transfer dan PAD di setiap ka-

bupaten/kota di Sulawesi Tengah serta keleluasaan mendesain program melalui perencanaan pembiayaan, diharapkan akan menciptakan pola perubahan struktur ekonomi sekaligus dapat mengoreksi ketimpangan yang terjadi selama ini. Dengan mempertimbangkan beberapa uraian permasalahan yang diungkapkan di atas, maka perlu dilakukan studi dengan tujuan untuk mengetahui apakah kebijakan desentralisasi fiskal selama sepuluh tahun berpengaruh terhadap pergeseran sektor (sektor primer menurun). Selain itu, studi ini ingin mengetahui pengaruh kebijakan desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan antarkabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah.

Tinjauan Referensi

Teori Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi dapat dimaknai sebagai gambaran sejauh mana kewenangan dipegang oleh pemerintah daerah untuk mampu mengambil keputusan sendiri yang mengikat beberapa kebijakan pada ruang lingkup pemerintahan daerah (Litvack *et al.*, 1998). Pentingnya kewenangan diberikan kepada pemerintah lokal (daerah) karena lebih efisien untuk kegiatan produksi dan penyediaan barang-barang publik (Musgrave dan Musgrave, 1989; Oates, 1993). Selain itu, pengambilan keputusan pada level pemerintah lokal akan lebih didengarkan untuk mengencangkan pilihan lokal dan lebih berguna bagi efisiensi sektor publik, serta akuntabilitas dan transparansi dalam pemberian layanan dan pembuatan kebijakan (de Mello, 2000; Wellisch, 2004).

Dengan demikian, pelaksanaan desentralisasi fiskal menjadi penting untuk dilakukan karena memiliki alasan ekonomi, di antaranya untuk meningkatkan penyediaan barang publik yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Studi Akai dan Sakata (2002) menemukan bahwa desentralisasi fiskal, terutama desentralisasi penerimaan memberikan sugesti pembangunan ke depan serta

memberikan stimulasi pertumbuhan ekonomi. Berbagai studi yang mendukung temuan ini seperti yang dilakukan oleh b. Ismail *et al.* (2004), Iimi (2005), Ding (2007), Akai *et al.* (2009), dan Samimi *et al.* (2010), menemukan bahwa desentralisasi fiskal berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Walaupun beberapa hasil studi menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu studi Davoodi dan Zou (1998) serta Martinez-Vazquez dan McNab (2006) di mana desentralisasi fiskal justru korelasinya negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara berkembang.

Merujuk pada beberapa teori dan dikuatkan dengan bukti empiris di beberapa negara, makin diyakini bahwa desentralisasi sebagai sistem pemerintahan dapat memacu laju pembangunan ekonomi daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, di samping mengembangkan prinsip-prinsip demokrasi dan partisipasi masyarakat lebih nyata. Ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal sangat diperlukan bagi Indonesia, di mana tidak mungkin semua urusan dilakukan secara terpusat karena faktanya selama pemerintahan sentralistik ketimpangan distribusi pendapatan sangat tinggi. Demikian juga ketimpangan antarwilayah Jawa dan luar Jawa, Indonesia bagian Timur, dan Indonesia bagian Barat. Adanya pelaksanaan desentralisasi fiskal diharapkan pemerintah daerah akan lebih efektif dan mampu untuk memenuhi pelayanan publik yang dibutuhkan, membangun sarana perekonomian, serta dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakatnya, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Prinsip dasar dari kebijakan desentralisasi fiskal, yakni memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah untuk melakukan kreasi meningkatkan penerimaan dan mengatur sendiri pengeluarannya (belanja), dengan demikian desentralisasi fiskal dapat dilihat dari sisi penerimaan maupun dari sisi pengeluaran. Oleh sebab itu, pengukuran desentralisasi

fiskal cukup beragam, jadi tidak ada satupun metode pengukuran yang baku atau indikator tunggal untuk mengukur desentralisasi fiskal (Martinez-Vazquez dan Timofeev, 2010). Indikator desentralisasi fiskal dapat diukur dari sisi rasio penerimaan pemerintah daerah terhadap penerimaan negara dan daerah (Lin dan Liu, 2000). Selain melihat dari sisi penerimaan, juga dapat diukur dari rasio pengeluaran pemerintah daerah terhadap pengeluaran pemerintahan di atasnya (Zhang dan Zou, 1998; Davoodi dan Zou, 1998). Akai dan Sakata (2002) menguraikan bahwa ada beberapa indikator untuk mengukur desentralisasi fiskal, antara lain (a) rasio penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah terhadap penerimaan dari pemerintah pusat, serta (b) rasio penerimaan sendiri pemerintah daerah terhadap total penerimaan, termasuk bantuan pemerintah di level provinsi (federal), dan (c) rasio penerimaan sendiri pemerintah daerah terhadap total penerimaan, tidak termasuk bantuan pemerintah di level provinsi (federal).

Pergeseran Sektoral

Perubahan struktur (pergeseran sektoral) mengandung makna terjadinya transformasi, bukan hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga berkaitan dengan kebiasaan atau cara memperlakukan kegiatan produksi ekonomi. Perubahan struktural telah banyak digunakan dalam studi ekonomi meskipun dengan makna dan interpretasi yang berbeda. Dalam ekonomi pembangunan, perubahan struktural umumnya dipahami sebagai pengaturan aktivitas produktif yang berbeda dalam perekonomian dan distribusi yang berbeda faktor produksinya di antara berbagai sektor ekonomi, berbagai pekerjaan, wilayah geografis, dan jenis produk (Machlup (1991) dalam Silva dan Teixeira, 2008).

Dengan demikian, pembangunan ekonomi mengandung arti luas dan mencakup perubahan pada tata susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Menurut Indiatuti (2003) pembangunan ekonomi mengacu pada semua

perubahan dalam perekonomian termasuk perubahan dalam struktur ekonomi yang menyertai perubahan *output* atau PDRB. Maka dari itu, pembangunan merupakan proses transformasi yang ditandai oleh perubahan struktur, yaitu perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Proses transformasi atau perubahan dalam struktur perekonomian suatu negara bergeser dari yang semula didominasi oleh sektor primer, seperti pertanian, ke sektor-sektor nonprimer, industri, perdagangan, dan jasa. Dengan adanya perubahan struktur atau pergeseran sektoral mengakibatkan perubahan dalam struktur produksi melalui pergeseran kesempatan kerja dan alokasi dana sekaligus memberikan nilai tambah kepada komoditi.

Secara umum proses perubahan struktur perekonomian ditandai dengan: (1) merosotnya pangsa sektor primer (pertanian); (2) meningkatnya pangsa sektor sekunder (industri); dan (3) pangsa sektor tersier (jasa) kurang lebih konstan, namun kontribusinya akan meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Untuk menganalisis perubahan struktur ekonomi, maka teori utama yang biasa dijadikan rujukan adalah teori transformasi struktural. Transformasi struktur produksi menunjukkan bahwa sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita, perekonomian suatu negara akan bergeser dari yang semula mengandalkan sektor pertanian mengalami penurunan, saat *Gross National Product* (GNP)/per kapita meningkat (Kuncoro, 2007).

Proses transformasi ekonomi dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi bukan hanya di negara-negara industri, akan tetapi juga dibutuhkan oleh negara berkembang. Menurut Bonet (2006), proses transformasi struktural ekonomi yang terjadi di negara berkembang juga dimaksudkan untuk mengurangi divergensi ekonomi, sebab negara yang masih mengandalkan sektor primer umumnya terjadi ketimpangan antarwilayah. Dalam proses pema-

ngunan ekonomi pada mulanya didominasi oleh berbagai sektor kemudian terkonsentrasi secara dinamis pada sektor tertentu, di mana ini merupakan indikasi bahwa terjadi proses transformasi yang dapat memberikan efek terjadinya penurunan ketimpangan regional. Berkaitan dengan itu, Caselli dan Coleman (2001) menyebutkan bahwa konvergensi ekonomi terjadi karena adanya transformasi struktural.

Chenery dan Syrquin (1975) menunjukkan corak jenis perubahan yang berlaku dalam proses pembangunan negara-negara berkembang. Perubahan tersebut dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu: (1) proses akumulasi, di mana kegiatan-kegiatan ekonomi yang termasuk sebagai proses akumulasi adalah pembentukan modal atau investasi, pendapatan pemerintah, dan kegiatan penyediaan pendidikan kepada masyarakat; (2) proses alokasi sumber-sumber daya, di mana yang tergolong sebagai alokasi sumber-sumber daya adalah struktur permintaan domestik, struktur produksi, dan struktur perdagangan; dan (3) proses demografi dan distributif, adapun yang tergolong dalam proses demografi dan distributif adalah alokasi tenaga kerja pada berbagai sektor, urbanisasi, tingkat kelahiran dan kematian, serta distribusi pendapatan.

Perubahan struktur (sektor) ekonomi yang terjadi setidaknya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor yang didasarkan oleh sumbernya (permintaan agregat/*Aggregate Demand* (AD) dan penawaran agregat/*Aggregate Supply* (AS)), selain itu perubahan struktur ekonomi terjadi karena adanya intervensi pemerintah (Tambunan, 2001). Faktor dari sisi AD yang paling dominan memengaruhi perubahan struktur yaitu permintaan domestik, sedangkan faktor yang menyebabkan perubahan struktur ekonomi dari sisi AS yaitu pergeseran keunggulan komparatif, perubahan teknologi, peningkatan sumber daya manusia (SDM), dan akumulasi modal. Selain itu, perubahan struktur ekonomi juga dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan perdagangan global, sementara

faktor internalnya adalah intervensi yang dilakukan oleh pemerintah berupa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah (Kuncoro, 2007).

Untuk keperluan penulisan ini, maka studi lebih memfokuskan perubahan struktur ekonomi yang dipengaruhi oleh faktor internal, yakni intervensi pemerintah melalui kebijakan desentralisasi fiskal atau melalui pengeluaran dalam bentuk transfer (*transfer of intergovernmental*), yaitu *block-grant* dan *specific-grant*, yang menjadi bagian penerimaan daerah. Dengan asumsi bahwa penerimaan makin besar sehingga daerah makin leluasa merencanakan pembangunan ekonomi beserta pembiayaannya untuk mendorong perubahan struktur ekonomi (Arham, 2013).

Untuk menganalisis dan mengetahui pergeseran dan peranan perekonomian di suatu daerah umumnya menggunakan analisis *ShiftShare*. Namun, penggunaan analisis *Shift-Share* untuk melihat pergeseran sektor relatif memiliki kelemahan, maka untuk keperluan studi ini menggunakan alat analisis, yakni *Structural Change Index* (SCI). Sebuah metode yang umum digunakan untuk mengukur perubahan struktural dalam tingkat *output* (dan pekerja) atau koefisien (komposisi) perubahan struktural. SCI untuk *output* dapat didefinisikan sebagai setengah jumlah dari nilai absolut dari perbedaan nilai tambah *share*/sektor dari waktu ke waktu. Formulasi rumus dari perhitungan ini adalah sebagai berikut (Jenissen, 1998; Jarrjoura, 2001; Dietrich, 2009).

$$SCI = \frac{1}{2} \sum |X_{i,t} - X_{i,t-1}| \quad (1)$$

dengan:

SCI : *Sectoral change index*;

X : Kontribusi (*share*) sektor dari total nilai *share* masing-masing sektor;

i : Sektor (*i*);

t : *Share* sektor primer periode sekarang;

t - 1 : *Share* sektor primer periode sebelumnya.

Penggunaan nilai absolut memastikan bahwa angka positif dan negatif dalam perubahan

nilai share sektor tidak membatalkan satu sama lain ketika nilai dijumlahkan. SCI dibatasi antara 0 hingga 100, dengan angka 0 berarti tidak ada perubahan struktural, sementara 100 menunjukkan kebalikannya, yaitu terjadi perubahan struktural secara lengkap (Janissen *et al.*, 1998).

Analisis lebih lanjut dalam studi ini untuk mengukur secara langsung pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pergeseran sektoral adalah dengan melakukan analisis regresi hasil perhitungan SCI. Mengenai pergeseran sektor merujuk pada teori perubahan struktur, di mana proses transformasi struktural ini berupa pergeseran dari sektor pertanian ke sektor industri dan kemudian beralih ke sektor jasa-jasa (Chenery dan Syrquin, 1975). Sementara pembagian tiga sektor acuannya adalah pada teori Fisher (1935), bahwa transformasi struktural merupakan peralihan dan pergeseran permintaan secara berangsur-angsur dari kegiatan sektor produksi primer (pertanian, pertambangan) ke sektor produksi sekunder (industri manufaktur dan konstruksi) dan ke sektor tersier (jasa), yang mengakibatkan perubahan dalam struktur produksi melalui pergeseran kesempatan kerja dan alokasi dana.

Untuk keperluan analisis, studi ini lebih difokuskan pada sektor primer karena daerah otonom di Provinsi Sulawesi Tengah masih mengandalkan sektor tersebut sebagai kontributor pembentukan *output*, di samping untuk menghindari hasil analisis yang bias jika memasukkan ketiga kelompok sektor (primer, sekunder, dan tersier).

Ketimpangan Antardaerah

Konsep ekonomi wilayah menjelaskan kesenjangan pendapatan dapat terjadi jika suatu wilayah berkembang mempunyai struktur ekonomi yang memungkinkan terjadinya *backwash effect* atau *polarization effect* terhadap faktor-faktor ekonomi dari wilayah-wilayah yang kurang berkembang, sehingga berdampak terhadap keterlambatan pertumbuhan ekonomi. Da-

lam konteks regional, ketimpangan antardaerah tidak dapat dihindari akibat tidak terjadinya *trickle down effect* dari *output* secara nasional terhadap masyarakat secara keseluruhan. Sjafrizal (2008) menyebutkan bahwa ketimpangan pembangunan antarwilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan disebabkan oleh adanya perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Pandangan tersebut hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Shankar dan Shah (2008), bahwa ketimpangan antardaerah merupakan suatu perkembangan yang selalu ada di berbagai negara, terutama bagi negara dengan geografis dan wilayah yurisdiksi yang luas.

Hal ini memperjelas bahwa kesenjangan distribusi pendapatan antarwilayah merupakan masalah universal, karena pada tingkat apa pun kesenjangan selalu ada, dikarenakan oleh perbedaan potensi-potensi ekonomi yang dimiliki masing-masing wilayah. Meskipun demikian, ketimpangan wilayah dan distribusi pendapatan bersifat "alamiah" dan universal yang tidak dapat dihindari, namun kondisi itu dapat diubah melalui proses pembangunan dan kebijakan. Kusnetz sudah dapat membuktikan hal itu, yaitu dalam analisis pola-pola pertumbuhan historis di negara-negara maju ditemukan bahwa pada tahap-tahap pertumbuhan awal distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun dalam tahap-tahap berikutnya hal itu akan membaik (Kuncoro, 2004).

Dasar teoritis analisis mengenai ketimpangan wilayah menggunakan hipotesis neoklasik (Kusnetz), menurut hipotesis neoklasik pada permulaan proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antarwilayah cenderung meningkat atau tidak merata. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak/melebar (*divergence*) (Kuncoro, 2006; Todaro dan Smith, 2006; Sjafrizal, 2008). Bila proses pembangunan terus berlanjut, maka berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antarwilayah tersebut menu-

run (*convergence*) menyerupai huruf U terbalik (*reverse U-shape curve*). Kurva U terbalik dapat diinterpretasikan sebagai relasi antara kesenjangan pendapatan dan tingkat pendapatan per kapita. Todaro dan Smith (2006) menyebutkan bahwa kurva Kusnetz dapat dihasilkan oleh proses pertumbuhan berkesinambungan yang berasal dari perluasan sektor modern, seiring dengan perkembangan sebuah negara dari perekonomian tradisional ke perekonomian modern.

Pembuktian hipotesis Kusnetz yang dilakukan oleh Williamson (1965) mengenai ketimpangan pembangunan antarwilayah dengan membandingkan antara negara berkembang dan negara maju dengan menggunakan data *time series* dan *cross section* dengan mengambil sampel sebanyak 24 negara dalam kurun waktu 10 tahun (1950–1960). Hasil studinya membuktikan bahwa hipotesis neoklasik terbukti secara empiris dan hasil pengukurannya menggunakan *Weighted Coefficient Variation (CV)*, yaitu indeks variasi pendapatan antardaerah dalam suatu wilayah.

Menurut Lessmann (2009), untuk mengukur ketimpangan antardaerah (*interregion*) dalam suatu negara ada tiga jenis pengukuran, yaitu (1) indikator ekonomi, yang umumnya menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB); (2) tingkat teritorial, untuk negara-negara Eropa umumnya menggunakan ukuran statistik unit teritorial dan di luar Eropa menggunakan ukuran perbedaan daerah; dan (3) pengukuran konsentrasi yang biasanya menggunakan koefisien variasi, koefisien Gini, dan koefisien *weighted-population*.

Pengukuran ketimpangan selama ini yang banyak digunakan yaitu indeks Williamson (CV), ataupun juga dapat menggunakan pengukuran lain, seperti indeks Theil dan koefisien Gini rasio untuk distribusi pendapatan. Namun, jenis-jenis pengukuran tersebut kurang cocok digunakan untuk keperluan data panel pada tingkat regional, karena itu penulisan ini menggunakan pengukuran ketimpangan pen-

dapatan per kapita relatif (Bonet, 2006). Pengukuran ini dapat digunakan secara fleksibel, di mana polanya mirip dengan pengukuran ketimpangan tradisional lainnya indeks Theil (Td), koefisien Gini, atau *Sigma Convergence*, yang dapat menghitung ketimpangan dalam daerah dan antardaerah secara sekaligus sehingga cakupan analisis menjadi lebih luas bila dibandingkan dengan indeks Williamson. Keseimbangan sempurna (ekuiti) terjadi bila mana per kapita kabupaten/kota sama dengan rata-rata provinsi pada daerah dan tahun tertentu. Formulasinya sebagai berikut:

$$\ln eq_{it} = \left| \frac{PCGDP_{it}}{PCGDP_t} - 1 \right| \quad (2)$$

dengan:

$\ln eq_{it}$ = Nilai ketimpangan relatif;

$PCGDP_{it}$ = Pendapatan per kapita tingkat kabupaten/kota;

$PCGDP_t$ = Pendapatan per kapita provinsi;

i = Menunjukkan daerah ($i = 1, 2, 3, \dots, 8$);

t = Tahun analisis ($t = 2001, 2002, \dots, 2010$);

Persamaan pengukuran ketimpangan tersebut pada dasarnya digunakan untuk mengukur ketimpangan fiskal (Qiao *et al.*, 2002). Selanjutnya, dimodifikasi untuk mengukur ketimpangan wilayah dengan menggunakan data PDRB per kapita sebagaimana yang dilakukan oleh Bonet (2006). Secara umum, hasil studi mengenai ketimpangan di Indonesia yang sudah dilakukan oleh beberapa ahli menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan antarwilayah di Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara maju (Sjafrizal, 2008; Akita, 2002; Akita *et al.*, 2011). Ketimpangan yang terjadi di suatu daerah disebabkan oleh banyak faktor (Sjafrizal, 2008), di antaranya; 1) Perbedaan yang sangat besar dalam kandungan sumber daya alam pada masing-masing daerah. Daerah dengan kandungan sumber daya alam yang cukup tinggi akan lebih mudah meningkatkan produksi dengan biaya relatif murah dibandingkan daerah yang mempunyai kandungan sumber daya alam yang lebih

rendah; 2) Perbedaan kondisi demografis yang cukup besar antardaerah. Kondisi demografis yang dimaksud adalah perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan, dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan, serta etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah bersangkutan; 3) Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa dapat pula mendorong terjadinya peningkatan ketimpangan pembangunan antarwilayah; dan 4) Alokasi dana pembangunan antardaerah, sistem pemerintahan cukup berpengaruh, bilamana sistem sentralistik diterapkan maka alokasi dana lebih banyak dialokasikan di pemerintahan pusat sehingga mengakibatkan kurangnya distribusi pengalokasian dana secara merata di berbagai wilayah.

Beberapa faktor pendorong terjadinya ketimpangan antarwilayah, faktor yang terakhir di atas memiliki relevansi dengan kebijakan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal merupakan suatu kebijakan yang dapat mengoreksi ketimpangan antardaerah, di mana beberapa studi terbaru memperlihatkan hasil empiris. Suwanan dan Sulistiani (2009) melihat kaitan antara desentralisasi fiskal dan kesenjangan wilayah di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan desentralisasi akan mendorong penurunan kesenjangan antardaerah. Bahkan daerah miskin sangat diuntungkan dengan adanya desentralisasi. Studi yang sama dilakukan oleh Widhiyanto (2008), menurutnya desentralisasi fiskal di Indonesia mendorong pertumbuhan ekonomi dan mereduksi disparitas pendapatan regional. Sementara Hartono dan Irawan (2011), mengukur ketimpangan di Indonesia selama pelaksanaan desentralisasi fiskal, di mana hasilnya menunjukkan ketidaksetaraan pendapatan rumah tangga diakibatkan ketimpangan antarsektor ekonomi.

Lessmann (2009) melakukan pengujian secara empiris tentang desentralisasi fiskal dan kesenjangan antarwilayah untuk negara-negara

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Hasilnya menunjukkan bahwa negara dengan tingkat desentralisasi fiskal yang tinggi memiliki kesenjangan wilayah yang rendah. Rodríguez-Pose dan Ezcurra (2010) menunjukkan bahwa ketimpangan yang terjadi bervariasi berdasarkan tingkat pembangunan negara atau tingkat kekayaan masing-masing negara. Bagi negara maju dan berpenghasilan tinggi, kebijakan politik desentralisasi berpengaruh terhadap penurunan ketimpangan, sedangkan pada negara berkembang yang berpenghasilan rendah dan menengah, kebijakan desentralisasi berpengaruh signifikan terhadap kenaikan ketimpangan.

Studi Sejenis Sebelumnya

Secara empiris sudah banyak studi yang dilakukan mengenai desentralisasi fiskal, namun lebih banyak melihat hubungannya dengan pertumbuhan dan ketimpangan. Sementara yang meneliti tentang pergeseran (perubahan) struktur dan ketimpangan di antaranya dilakukan oleh Akita *et al.* (2011), yang melihat perubahan struktur dan ketimpangan distribusi pendapatan regional di Indonesia. Share sektor pertambangan mengalami penurunan, akan tetapi di Sumatera dan Kalimantan secara spasial industri manufaktur memainkan peran penting terciptanya ketimpangan. Sementara di Jakarta dipengaruhi oleh kekuatan urbanisasi, dampak globalisasi dan liberalisasi perdagangan, serta sektor keuangan sangat memengaruhi ketidaksetaraan.

Valli dan Saccone (2009) meneliti tentang pergeseran struktural dan pembangunan di Cina dan India. Perubahan struktur yang terjadi di Cina terutama didorong oleh reformasi ekonomi dan pertumbuhan pasar internal sejak tahun 1980-an dan tahun 1990-an, yang dengan cepat melakukan penetrasi pasar dunia, namun sebagian besar ekspor Cina di sektor teknologi menengah dan teknologi tinggi dikarenakan joint-venture. Sementara di India, perubahan struktur yang terjadi lebih seimbang meskipun

lebih lambat dalam pasar dunia karena produk seperti perangkat lunak, baja, otomotif, dan farmasi lebih banyak dihasilkan sendiri, bukan joint-venture.

Sedangkan studi yang berkaitan antara desentralisasi fiskal dengan perubahan struktur dan ketimpangan masih relatif terbatas di Indonesia. Dirgantoro *et al.* (2009) melakukan pengujian dampak desentralisasi fiskal terhadap perubahan struktur tenaga kerja di Jawa Barat. Hasilnya menunjukkan bahwa Jawa Barat mengalami transformasi struktur tenaga kerja selama berlangsungnya proses pembangunan. Transformasi struktur tenaga kerja yang terjadi, yaitu sektor pertanian tidak berkaitan erat dengan sektor industri. Penurunan kontribusi tenaga kerja di sektor pertanian tidak secara otomatis diikuti oleh peningkatan kontribusi tenaga kerja di sektor industri, akan tetapi diserap di sektor lainnya seperti sektor informal. Peningkatan belanja pegawai dan penerimaan daerah dari Dana Alokasi Umum (DAU) berdampak positif baik terhadap tenaga kerja sektor pertanian, sehingga total tenaga kerja dan kontribusi tenaga kerja sektor pertanian meningkat. Peningkatan belanja sektor pertanian berdampak positif terhadap tenaga kerja pertanian, di mana terjadi peningkatan kontribusi tenaga kerja sektor pertanian, akan tetapi berdampak negatif terhadap total tenaga kerja. Peningkatan pengeluaran untuk infrastruktur berdampak positif terhadap tenaga kerja total, tetapi berdampak negatif pada tenaga kerja sektor pertanian dan kontribusi tenaga kerja sektor pertanian menjadi menurun, yang berarti terjadi transformasi di sektor pertanian.

Bonet (2005) melihat kaitan antara desentralisasi, pergeseran struktur, dan ketimpangan regional di Kolombia. Hasilnya memperlihatkan bahwa desentralisasi fiskal berdampak terhadap meningkatnya ketimpangan pendapatan antardaerah, keterbukaan ekonomi, dan aglomerasi ekonomi, tetapi sebaliknya berdampak negatif terhadap ketimpangan, oleh karena itu

diperlukan perubahan struktur ekonomi.

Berbagai hasil studi di atas dapat menjadi rujukan, namun studi ini lebih mendekati yang telah dilakukan oleh Bonet (2005). Hanya saja pergeseran sektor tidak dilakukan estimasi dan instrumennya menggunakan interaksi tabel *Input-Output*, sehingga kurang tampak pengaruh kebijakan desentralisasi fiskal terhadap pergeseran sektor. Oleh sebab itu, studi mengenai pergeseran sektor dan ketimpangan yang dipengaruhi kebijakan desentralisasi fiskal termasuk studi yang masih baru. Atas dasar itu, dirumuskan dua model persamaan dengan mengadopsi beberapa hasil studi sebelumnya dengan menggunakan data panel, yaitu kaitan antara desentralisasi fiskal dan pergeseran sektor mengadopsi model Bonet (2005), sedangkan kaitan antara desentralisasi fiskal dan ketimpangan mengikuti model dasar dari Lesmann (2006) serta Suwanan dan Sulistiani (2009).

Metode

Studi ini menggunakan pengolahan panel data, di mana data satuan (unit) sebanyak 8 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah dan periode waktu selama 10 tahun. Tahapan studi ini dilakukan melalui beberapa langkah, pertama mengalkulasi nilai indeks pergeseran dengan metode perhitungan SCI, dan hanya nilai SCI sektor primer diregresikan dengan tujuan untuk memudahkan analisis, serta menghindari bias penafsiran. Langkah kedua menghitung nilai ketimpangan dengan menggunakan model Qi-ao *et al.* (2002) yang dimodifikasi oleh Bonet (2006), metode perhitungan ini hampir sama dengan Entropi Theil. Langkah ketiga melakukan regresi desentralisasi fiskal terhadap nilai indeks pergeseran sektor untuk persamaan pertama dan persamaan kedua desentralisasi fiskal terhadap nilai indeks ketimpangan.

Model Pergeseran Sektor

Model pergeseran sektor yang digunakan dalam studi ini didasarkan dari teori dasar Che-

nery dan Syrquin (1975), bahwa perubahan struktur produksi setidaknya dipengaruhi dari pendapatan dan jumlah populasi di suatu negara, dan secara empiris dilakukan oleh Azis (1992) dengan menambahkan variabel dana Inpres. Secara khusus, studi terdahulu yang dilakukan oleh Bonet (2006) adalah studi tentang hubungan antara desentralisasi fiskal terhadap pergeseran sektor, hanya saja studi tersebut tidak melakukan regresi. Instrumen yang digunakan adalah tabel *Input-Output*, sehingga kurang tampak pengaruh kebijakan desentralisasi fiskal terhadap pergeseran sektor. Keterbatasan teori secara spesifik dan studi-studi terdahulu membuat studi ini menjadi penting dilakukan, sekaligus dapat dianggap sebagai kelebihan dibandingkan dengan studi sebelumnya.

Persamaan pergeseran sektor ini lebih menekankan pada sektor primer yang diproksi dari nilai *sectoral change index* kabupaten/kota, dengan asumsi bahwa kabupaten/kota di Sulawesi Tengah sektor pertanian berkontribusi paling besar terhadap pembentukan perekonomian wilayah, adapun model empiris yaitu sebagai berikut:

$$SC_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 \ln PDRBCAP_{it} + \alpha_2 \ln POP_{it} + \alpha_3 UNEMP_{it} + \alpha_4 IKF + FD_{it} + \varepsilon_1 \quad (3)$$

dengan:

SC : Pergeseran sektor;

PDRBCAP : PDRB per kapita Atas Dasar Harga Konstan (Rupiah), harga dasar tahun 2000;

POP : Jumlah penduduk (Jiwa);

IKF : Indeks kemampuan fiskal;

UNEMP : Angka pengangguran (Persen);

FD : Desentralisasi fiskal (Persen);

i : Kabupaten/Kota;

t : Periode waktu.

Pada Persamaan (3), pergeseran sektor merupakan variabel terikat, sementara variabel penjelas ditentukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mendorong terjadinya pergeseran (perubahan) struktur, di antara-

nya pendapatan per kapita, jumlah penduduk, struktur tenaga kerja (pengangguran), kemampuan fiskal, dan desentralisasi fiskal. Semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat, jumlah penduduk bertambah, angka pengangguran berkurang, kemampuan fiskal tinggi, dan rasio PAD terhadap total penerimaan makin meningkat, maka diduga akan mendorong terjadinya perubahan struktur ekonomi yang ditandai dengan menurunnya peranan sektor primer. Definisi operasional dari tiap variabel pada model ini dapat dilihat pada lampiran (3).

Model Ketimpangan Antarkabupaten/kota

Setelah indeks ketimpangan dikalkulasikan, maka indeks tersebut dijadikan sebagai variabel terikat. Model yang digunakan dalam studi ini mengikuti model dasar dari Lesmann (2006) pada negara-negara OECD, Suwanan dan Sulistiani (2009) di Indonesia, dan modifikasi penulis berdasarkan keterbatasan model empiris sebelumnya. Adapun model disusun seperti sebagai berikut:

$$INEQ_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln PDRBCap_{it} + \beta_2 \ln POP_{it} + \beta_3 POV_{it} + \beta_4 HDI_{it} + \beta_5 UNEMP_{it} + \beta_6 FD_{it} + \varepsilon_2 \quad (4)$$

dengan:

INEQ : Kesenjangan daerah dikalkulasikan dari indeks ketimpangan;

PDRBCap : PDRB per kapita Atas Dasar Harga Konstan (Rupiah), Harga dasar tahun 2000;

POP : Jumlah penduduk (Jiwa);

POV : Tingkat kemiskinan (Persen);

HDI : Indeks pembangunan manusia ;

UNEMP : Angka pengangguran (Persen);

FD : Desentralisasi fiskal (Persen).

Ada banyak faktor yang dapat mendorong terjadinya ketimpangan, salah satu faktornya adalah kebijakan desentralisasi fiskal, prinsipnya desentralisasi memberikan kewenangan

yang luas kepada daerah untuk mendesain perencanaan pembangunan dan melakukan kreasi meningkatkan penerimaan berdasarkan potensi yang dimilikinya sehingga akan mengurangi ketimpangan yang terjadi selama ini. Selain itu, variabel penjelas lainnya ditentukan dengan mempertimbangkan variabilitas kemampuan ekonomi masyarakat, jumlah populasi, angka kemiskinan, kualitas sumber daya manusia, dan struktur tenaga kerja (pengangguran). Makin tinggi tingkat pendapatan per kapita masyarakat, jumlah penduduk produktif banyak, angka kemiskinan sedikit, kemampuan SDM yang tinggi, angka pengangguran rendah, dan rasio PAD terhadap total penerimaan besar, maka akan mengoreksi ketimpangan antarkabupaten/kota (daerah). Uraian mengenai definisi operasional dapat dilihat pada lampiran (3).

Metode Pengumpulan Data dan Analisis Data

Data yang digunakan dalam studi ini merupakan data sekunder. Sumber perolehan data adalah *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Indonesia, 2001–2010* dari Kementerian Keuangan (2010) untuk data keuangan (fiskal) daerah dan *Daerah Dalam Angka Provinsi Sulawesi Tengah, 2001–2010* dari Badan Pusat Statistik/BPS (2010) untuk data makroekonomi daerah, dan keseluruhan data tersebut merupakan data kuantitatif. Pendekatan yang digunakan untuk mengestimasi parameter model pergeseran sektor dan ketimpangan wilayah adalah pendekatan data panel. Hasil pengujian pemilihan teknik dalam pengolahan data panel telah dilakukan pengujian statistik melalui uji Hausman dan uji Chow. Berdasarkan hasil uji Hausman dan uji Chow, model yang tepat digunakan untuk kedua persamaan, yaitu pergeseran dan ketimpangan antarkabupaten/kota adalah pendekatan *fix effect*, dengan melakukan pembobotan melalui *coefficient covariance white cross section method*. Untuk mempero-

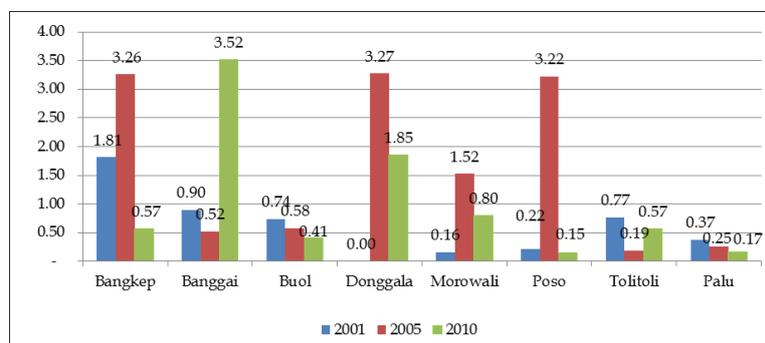
leh penduga yang bersifat *Best, Linear, Unbiased Estimator* (BLUE), maka penduga harus terbebas dari pelanggaran asumsi klasik, yaitu multikolonieritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas.

Hasil dan Analisis

Pola Pergeseran Sektor

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pergeseran sektor didapatkan dari nilai sectoral change index dengan dibagi menjadi tiga kelompok sektor, yakni sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier. Namun, hanya nilai sektor primer (pertanian, penggalian, dan pertambangan) yang dianalisis untuk meminimalkan kekeliruan (bias) karena bisa saja nilai koefisien masing-masing sektor bernilai negatif (turun). Jika hasil regresi menunjukkan pada kondisi tersebut, maka akan sulit dilakukan analisis dalam pengertian pergeseran sektor ke arah mana. Lain halnya jika hanya sektor primer yang dianalisis, apabila nilai koefisien sektor primer bernilai negatif diasumsikan sektor primer menurun, dan given sektor-sektor lainnya meningkat. Berdasarkan kalkulasi indeks pergeseran sektor primer kabupaten/kota di Sulawesi Tengah secara rinci dapat dilihat pada lampiran (1), sementara yang ditampilkan berikut sifatnya lima tahunan menunjukkan pola seperti Gambar 1.

Pada 2001, terlihat nilai pergeseran sektor primer relatif tinggi masing-masing Kabupaten Bangkep (1,81), Kabupaten Banggai (0,90), Kabupaten Tolitoli (0,77), dan Kabupaten Bulu (0,90), paling rendah Kabupaten Morowali (0,16). Tahun 2005, nilai indeks pergeseran paling tinggi dialami oleh Kabupaten Donggala (3,27), disusul Kabupaten Banggai Kepulauan (3,26), Kabupaten Poso (3,22) dan Morowali (1,52), terendah Kabupaten Tolitoli (0,19). Pada 2010, yaitu akhir periode studi, nilai indeks paling tinggi adalah Kabupaten Banggai (3,52), Kabupaten Donggala (1,85), serta Bangkep dan Tolitoli masing-masing (0,57),

Gambar 1: Pola Pergeseran Sektor Primer Setiap Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah

Sumber: Hasil Olahan Penulis, (2014)

dan terendah adalah Kabupaten Poso (0,15).

Pola Ketimpangan Antarkabupaten/Kota

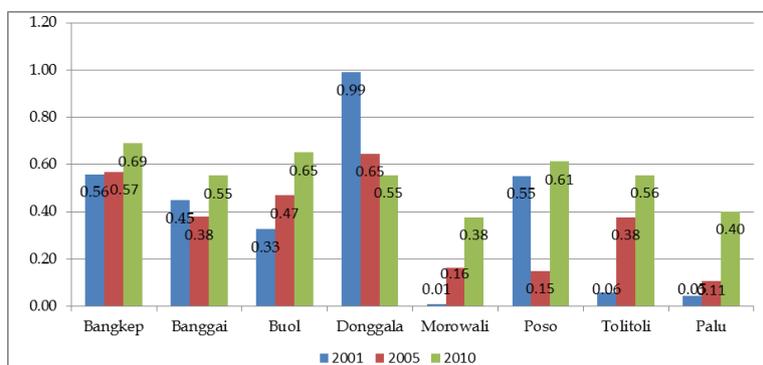
Usaha-usaha pembangunan yang dilakukan, tidak lain untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya, bersamaan menurunnya ketimpangan distribusi pendapatan. Untuk mengatasi masalah ketimpangan ada banyak kebijakan afirmasi yang dapat dijalankan oleh pemerintah maupun inisiatif masyarakat itu sendiri. Desentralisasi fiskal merupakan keputusan politik dan kebijakan pemerintah yang diyakini salah satu solusi untuk mengurangi ketimpangan antardaerah. Berdasarkan hasil kalkulasi indeks ketimpangan secara periodik lima tahunan, didapatkan nilai seperti Gambar 2 (Rincian kalkulasi indeks ditampilkan pada lampiran (2)).

Pada awal pelaksanaan desentralisasi fiskal di Sulawesi Tengah terlihat bahwa ketimpangan interregion, Kabupaten Donggala sangat tinggi (0,99), disusul Kabupaten Bangkep (0,56) dan Kabupaten Poso (0,55), terendah Kabupaten Morowali (0,01). Selama lima tahun perjalanan desentralisasi fiskal, ketimpangan di Kabupaten Donggala masih yang tertinggi (0,65), kemudian Kabupaten Banggai (0,57), kedua daerah ini merupakan daerah induk, dan ketimpangannya mengalami penurunan

an, dan terendah Kabupaten Morowali (0,16). Jika diukur perjalanan pelaksanaan otonomi daerah selama 10 tahun, nilai ketimpangan tertinggi berubah polanya, justru Kabupaten Bangkep mengalami peningkatan ketimpangan (0,69), kemudian Kabupaten Buol (0,65), Poso (0,61), dan Tolitoli (0,56), dan terendah Morowali (0,38). Dua daerah yang tertinggi ketimpangannya pada tahun kesepuluh pelaksanaan desentralisasi, yaitu Kabupaten Bangkep dan Buol, yang merupakan kabupaten pemekaran.

Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap Pergeseran Sektor

Model pendekatan yang diestimasi adalah faktor-faktor pendapatan per kapita, jumlah populasi, angka pengangguran, kemampuan fiskal, dan desentralisasi fiskal (FD) terhadap pergeseran sektor. Berdasarkan serangkaian pengujian atau diagnostik pada kriteria statistik terkait dengan model *goodness of fit* dan pengujian hipotesis, hasil pengolahan data model pergeseran sektor menunjukkan bahwa secara serempak (bersama-sama) memengaruhi variabel terikat secara signifikan. Selain itu, evaluasi model dengan kriteria ekonomi dengan melihat tanda dan besaran nilai koefisien dari variabel bebas, dan terlihat tidak semua arah koefisien sesuai teori. Hasil penaksiran parameter-parameter persamaan pergeseran

Gambar 2: Pola Ketimpangan Antarkabupaten/Kota di Sulawesi Tengah

Sumber: Hasil Olahan Penulis, (2014)

an sektor dapat dilihat pada Tabel 1.

Hasil estimasi menjelaskan bahwa pendapatan per kapita sebagai efek dari kegiatan perekonomian daerah tampak memberikan pengaruh signifikan dan memiliki korelasi negatif terhadap pergeseran sektor. Jika terjadi kenaikan pendapatan per kapita, maka peranan sektor primer makin menurun. Berdasarkan data BPS, kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan *output* perekonomian di Sulawesi Tengah setiap tahunnya makin menurun. Sedangkan faktor populasi tidak hanya sebatas menggambarkan kuantitas akan tetapi juga penting dipertimbangkan masalah produktivitasnya (kualitas), karena jumlah penduduk dapat berdampak positif dan negatif, tergantung dari kemampuan penduduk itu sendiri untuk dapat mengakumulasi kapital dari serangkaian kegiatan ekonomi. Berkaitan dengan hal tersebut, hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel penduduk tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap pergeseran sektor. Dengan kata lain, jumlah populasi yang semakin bertambah tidak berpengaruh terhadap upaya suatu daerah untuk mendorong terjadinya perubahan struktur dalam jangka panjang. Temuan ini tidak sejalan dengan teori Chenery dan Syrquin (1975), bahwa perubahan struktur produksi dipengaruhi oleh jumlah penduduk di suatu wilayah.

Variabel angka pengangguran menunjukkan kondisi serupa, yakni tidak berpengaruh signifikan terhadap pergeseran struktur kegiatan ekonomi. Menurut Dirgantoro *et al.* (2009), perubahan struktur tenaga kerja tidak terjadi, karena jumlah pekerja di sektor pertanian cenderung tetap tinggi dan tidak bergeser atau tidak berkaitan dengan sektor industri, namun ada kemungkinannya terserap ke sektor informal. Karena pada kenyataannya, struktur perekonomian Sulawesi Tengah, yaitu sektor industri belum berkembang sebagaimana yang juga terjadi di wilayah lainnya di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Dari hasil estimasi yang dilakukan, variabel kemampuan fiskal daerah berpengaruh signifikan, yang menunjukkan besarnya kemampuan fiskal pada masing-masing kabupaten/kota di Sulawesi Tengah. Jika terjadi perubahan, maka akan menggeser struktur produksi ekonomi, dengan kata lain peranan sektor primer makin menurun. Selanjutnya, kebijakan desentralisasi fiskal sebagai variabel utama, pengaruhnya terhadap pergeseran sektor adalah signifikan. Setiap terjadi kenaikan rasio penerimaan PAD terhadap total penerimaan masing-masing kabupaten/kota di Sulawesi Tengah, akan mengakibatkan peranan sektor primer menurun dan pada saat yang sama peranan sektor sekunder dan tersier meningkat. Bukti empiris ini

sesuai dengan yang diharapkan, sebab secara teoritis desentralisasi fiskal merupakan bagian dari deregulasi politik dan ekonomi yang akan mendorong perubahan struktur produksi ekonomi. Jarjoura (2001) menguraikan bahwa dengan adanya deregulasi akan mendorong ketergantungan ekonomi terhadap sektor perdagangan dan jasa (*services*) yang meningkat seiring dengan menurunnya peranan sektor primer (SDA).

Dengan demikian, peningkatan penerimaan yang bersumber dari PAD bagi kabupaten/kota di Sulawesi Tengah sangat diperlukan, terutama implikasi langsung dari kegiatan investasi dan kegiatan ekonomi produktif masyarakat. Jika melihat pola daya tarik investasi, pada umumnya kabupaten/kota di Sulawesi Tengah masih lemah. Hasil studi Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah/KPPOD (2002) menunjukkan bahwa hambatan utama investasi di daerah adalah faktor kelembagaan, atau pelayanan birokrasi yang tidak efisien, dan banyaknya peraturan yang mengarah pada pungutan yang cenderung membebani pelaku usaha.

Hasil estimasi dengan *fixed effect* menjelaskan adanya perbedaan perilaku atau intersep masing-masing kabupaten/kota, nilai intersep yang tertinggi adalah Kabupaten Tolitoli sebesar 22.149, disusul Kabupaten Poso sebesar 21.871, dan yang terendah Kabupaten Banggai (21,271). Kenaikan rasio penerimaan Kabupaten Tolitoli dan Kabupaten Poso cenderung akan mendorong peningkatan peranan sektor primer terhadap perekonomian di dua kabupaten tersebut. Sedangkan kenaikan rasio penerimaan Kabupaten Banggai pengaruhnya terhadap pergeseran sektor relatif kecil dengan artian peranan sektor primer pertumbuhannya melambat dibandingkan dengan daerah lainnya yang ada di Sulawesi Tengah. Boleh jadi karena di Kabupaten Banggai industri mulai berkembang setelah adanya eksplorasi migas selama pelaksanaan otonomi daerah. Untuk jangka panjang Kabupaten Banggai peranan sektor

sekunder dan tersier akan terus meningkat dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto.

Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap Ketimpangan Kabupaten/Kota

Model pendekatan yang diestimasi adalah faktor-faktor pendapatan per kapita masyarakat, jumlah populasi, tingkat kemiskinan kabupaten/kota, kualitas sumber daya manusia yang diproksi dari indeks pembangunan manusia, angka pengangguran, dan rasio pengeluaran (FD) terhadap pola ketimpangan wilayah.

Berdasarkan hasil estimasi, model persamaan menunjukkan bahwa faktor pendapatan per kapita diukur dari kemampuan daya beli masyarakat berpengaruh signifikan dan berkorelasi positif. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi kenaikan pendapatan per kapita masyarakat akan berdampak terhadap meningkatnya ketimpangan antarkabupaten/kota di Sulawesi Tengah. Secara teoritis, idealnya pendapatan per kapita masyarakat akan mengoreksi ketimpangan yang terjadi. Akan tetapi, ada kemungkinan bahwa pendapatan per kapita masyarakat cenderung terkonsentrasi peningkatannya di daerah tertentu atau sekelompok orang.

Kondisi ini makin diperkuat dari faktor jumlah penduduk, di mana variabel demografi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan antarkabupaten/kota di Sulawesi Tengah. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi kenaikan jumlah populasi akan meningkatkan ketimpangan di Sulawesi Tengah. Pertambahan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan cenderung meningkatkan ketimpangan, sebab akan mendorong pengeluaran pemerintah untuk pengadaan barang publik makin meningkat. Studi Suwanan dan Sulistiani (2009) dapat membuktikan asumsi tersebut, yakni pertambahan jumlah populasi menciptakan ketimpangan antarwilayah di Indonesia. Namun demikian, pertambahan jumlah penduduk berpotensi untuk mengembangkan SDM lebih terbuka sehingga

dapat mengakumulasi kapital sebagai faktor pendorong pertumbuhan ekonomi.

Variabel kemiskinan memiliki korelasi positif dengan ketimpangan di Sulawesi Tengah. Dengan demikian, setiap terjadi kenaikan angka kemiskinan akan berdampak terhadap meningkatnya ketimpangan antarkabupaten/kota di Sulawesi Tengah. Untuk variabel kualitas sumber daya manusia, yang diukur dari indeks pembangunan manusia dapat mengoreksi ketimpangan yang terjadi antarkabupaten/kota di Sulawesi Tengah, hanya saja tidak berpengaruh secara signifikan. Demikian halnya variabel angka pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap perbaikan ketimpangan.

Sedangkan variabel utama, yakni desentralisasi fiskal, hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan, hanya saja arah nilai koefisien tidak sesuai dengan tujuan pelaksanaan desentralisasi untuk mengurangi ketimpangan. Kenaikan rasio penerimaan (PAD) justru akan memperparah ketimpangan di Sulawesi Tengah, temuan ini sejalan dengan hasil studi oleh Kim *et al.* (2003) di Korea bahwa ada kecenderungan desentralisasi fiskal meningkatkan ketimpangan. Rodríguez-Pose dan Gill (2004), Nugrahanto dan Muhyiddin (2008), Baskaran dan Feld (2009), serta Jin dan Rider (2010) menemukan hasil yang sama, bahwa desentralisasi justru akan mendorong peningkatan ketimpangan antardaerah.

Dengan demikian, hasil empiris ini secara umum berbeda dengan hasil studi sebelumnya di Indonesia yang dilakukan oleh Widiyanto (2008) serta Suwanan dan Sulistiani (2009), bahwa desentralisasi fiskal dapat mengurangi ketimpangan. Sejalan dengan itu, memperkuat pula asumsi sebelumnya bahwa negara/daerah yang masih bertumpu pada sektor primer kecenderungan terjadinya ketimpangan masih sangat tinggi. Hasil estimasi dengan *fixed effect* menjelaskan adanya perbedaan perilaku masing-masing kabupaten/kota, nilai intersep yang tertinggi adalah Kabupa-

ten Buol sebesar -12.200, disusul Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar -12.115. Sementara yang terendah adalah Kota Palu sebesar -11.168. Setiap terjadi kenaikan rasio PAD di dua kabupaten (Buol dan Banggai Kepulauan) memberikan pengaruh yang kuat untuk menurunkan ketimpangan dibandingkan dengan daerah lainnya. Kedua daerah tersebut merupakan kabupaten pemekaran yang berada di wilayah perbatasan yang memiliki karakteristik yang berbeda, Kabupaten Buol merupakan daerah pertanian, sedangkan Kabupaten Bangkep wilayah kepulauan. Sementara Kota Palu kenaikan rasio PAD pengaruhnya terhadap ketimpangan relatif lebih kecil dibandingkan dengan daerah otonom (kabupaten) yang ada di Sulawesi Tengah. Namun demikian, pola ketimpangan Kota Palu relatif kecil dibandingkan kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut. *Pertama*, kebijakan desentralisasi fiskal dapat mendorong terjadinya pergeseran sektor (perubahan struktur) ekonomi di Sulawesi Tengah, di mana peranan sektor primer kecenderungannya makin menurun, sehingga berakibat pada peningkatan peranan sektor sekunder dan tersier selama pelaksanaan otonomi daerah. Selain itu, diharapkan akan mengakibatkan perubahan dalam struktur produksi melalui pergeseran kesempatan kerja. Dalam tataran aplikatif, pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Tengah perlu lebih mengoptimalkan PAD namun tidak menciptakan ekonomi biaya tinggi, yang selanjutnya memperbesar proporsi belanja publik karena masih minimnya investasi yang dapat mendorong peningkatan PAD. Hal ini diperlukan karena meskipun terjadi perubahan struktur ekonomi dengan menurunnya peranan sektor primer, akan tetapi kontributor utama perekonomian di wilayah Sulawesi Tengah

masih didominasi sektor pertanian, sementara sektor ini pertumbuhannya lambat, dan penyerapan tenaga kerja kecil.

Kedua, kebijakan desentralisasi fiskal yang telah berjalan meningkatkan ketimpangan antarkabupaten/kota di Sulawesi Tengah selama pelaksanaan otonomi daerah. Oleh karenanya, pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Tengah perlu melakukan perbaikan institusi kelembagaan pemerintah daerah dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemungutan PAD. Selain diperlukan prioritas perencanaan dan kegiatan pembangunan yang memiliki efek untuk menciptakan pemerataan.

Berdasarkan simpulan di atas, maka disampaikan beberapa saran, yaitu: Pertama, variabel fiskal daerah (desentralisasi fiskal) terbukti berperan memengaruhi pergeseran sektor (perubahan struktur), namun perlu dipertimbangkan untuk mengintroduksi variabel investasi. Variabel tersebut diduga berperan pada perubahan struktur dan penurunan ketimpangan, baik secara langsung maupun tidak langsung antarkabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah, sekaligus merupakan kelemahan dari studi ini. Kedua, temuan bahwa desentralisasi fiskal (kenaikan rasio penerimaan PAD terhadap total penerimaan kabupaten/kota) belum dapat mengoreksi ketimpangan antarkabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Maka studi selanjutnya perlu mempertimbangkan dengan memasukkan variabel desentralisasi fiskal tidak hanya melihat dari sisi *revenue*, namun juga perlu melihat dari sisi *expenditure* seperti studi yang dilakukan oleh Zhang dan Zou (1998), serta Akai dan Sakata (2002) sebagai alternatif permodelan untuk dapat memperoleh hasil yang lebih baik.

Daftar Pustaka

- [1] Akai, N., & Sakata, M. (2002). Fiscal Decentralization Contributes to Economic Growth: Evidence from State-Level Cross-Section Data for the United States. *Journal of Urban Economics*, 52, 93–108.
- [2] Akai, N., Hosoi, N., & Nishimura, Y. (2009). Fiscal Decentralization and Economic Volatility: Evidence from State Level Cross-Section Data of the USA. *Japanese Economic Review*, 60 (2), 223–235.
- [3] Akita, T., (2002). Regional Income Inequality in Indonesia and the Initial Impact of the Economic Crisis. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 38 (2), 201–222.
- [4] Akita, T., Kurniawan, P. A., & Miyata, S. (2011). Structural Changes and Regional Income Inequality in Indonesia: A Bidimensional Decomposition Analysis. *Asian Economic Journal*, 25 (1), 55–77.
- [5] Arham, M. A. (2013). Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pergeseran Sektor dan Ketimpangan Antar Kabupaten/Kota di Sulawesi dan Jawa. *Disertasi*. Bandung: Pasacasarjana FEB Unpad.
- [6] Azis (1992)
- [7] b. Ismail, A. G., Hamzah, M. Z., & Ritonga, J. T. (2004). Fiscal Decentralization and Economic Growth: Evidence from Selected Muslim Countries. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 9 (2), 109–116.
- [8] Bappenas. (2013). *Analisis Kesenjangan Antar Wilayah 2013*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/139281-%5B_Konten_%5D-Konten%20C9754a.pdf (Accessed
- [9] Baskaran, T., & Feld, L. P. (2009). Fiscal Decentralization and Economic Growth in OECD Countries: Is there A Relationship? *CESifo Working Paper Series*, 2721. Munich, Germany: Center for Economic Studies and Ifo Institute (CESifo). http://www.cesifo-group.de/portal/page/portal/DocBase_Content/WP/WP-CESifo_Working_Papers/wp-cesifo-2009/wp-cesifo-2009-07/cesifo1_wp2721.pdf (Accessed
- [10] Bonet, J. A. (2005). Decentralization, Structural Change and Regional Disparities in Colombia. *Doctoral dissertation*. United States: University of Illinois at Urbana-Champaign.
- [11] Bonet, J. A. (2006). Fiscal Decentralization and Regional Income Disparities: Evidence from the Colombian Experience. *The Annals of Regional Science*, 40 (3), 661–676.
- [12] BPS. (2010). *Daerah Dalam Angka Provinsi Sulawesi Tengah, 2001–2010*. Palu, Sulawesi Tengah: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah.
- [13] Caselli, F. & Coleman, W. J., (2001). The U.S. Structural Transformation and Regional Convergence: A Reinterpretation. *Journal of Political Economy*, 109 (3), 584–616.
- [14] Chenery, H. B., & Syrquin, M. (1975). *Patterns*

- of Development 1950–1970. Oxford, U.K.: Oxford University Press.
- [15] Davoodi, H. & Zou, H. F. (1998). Fiscal Decentralization and Economic Growth: A Cross-Country Study. *Journal of Urban Economics*, 43 (2), 244–257.
- [16] de Mello, L. R., (2000). Fiscal Decentralization and Intergovernmental Fiscal Relations: A Cross-Country Analysis. *World Development*, 28 (2), 365–380.
- [17] Dietrich, A. (2009). Does Growth Cause Structural Change, or Is it the Other Way Round? A Dynamic Panel Data Analyses for Seven OECD Countries. *Jena Economic Research Papers, 2009-034*. Jena, Germany: Friedrich Schiller University and the Max Planck Institute of Economics.
- [18] Ding, Y. (2007). Fiscal Decentralization and Economic Growth in China, 1994–2002. *Journal of Chinese Economic and Business Studies*, 5 (3), 243–260.
- [19] Dirgantoro, M. A., Mangkuprawira, S., Siregar, H. & Sinaga, B. M. (2009). Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Transformasi Ekonomi di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 5 (1), 1–9.
- [20] Djojohadikusumo, S. (1994). *Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- [21] Fisher, A. G. B. (1935). *The Clash of Progress and Security*. London: MacMillan & Co. Ltd.
- [22] Hammond, G. W., & Tosun, M. S. (2011). The Impact of Local Decentralization on Economic Growth: Evidence from U.S. Counties. *Journal of Regional Science*, 51 (1), 47–64.
- [23] Hartono, D., & Irawan, T. (2011). Decentralization Policy and Equality: A Theil Analysis of Indonesian Income Inequality. *European Journal of Economics, Finance & Administrative Sciences*, 29, 41–51.
- [24] Iimi, A. (2005). Decentralization and Economic Growth Revisited: An Empirical Note. *Journal of Urban Economics*, 57 (3), 449–461.
- [25] Indiastuti, R. (2003). The Financing of Regional Development and Economic Growth in West Java Province. *Working Paper in Economics and Development Studies, 200304*. Bandung: Department of Economics. Padjadjaran University. <http://lp3e.fe.unpad.ac.id/wopeds/200304.pdf> (Accessed).
- [26] Janissen, B., Thomson, R., Clark, C., & Geer, T. (1998). Aspects of Structural Change in Australia. *Productivity Commission Working Paper, 1560*. Canberra, Australia: AusInfo - Commonwealth of Australia.
- [27] Jarjoura, G. (2001). Structural Change in Australia's Trade and Manufacturing Sectors: Progress and Problems. *Journal of Economic and Social Policy*, 6 (1), 1–28. <http://epubs.scu.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1027&context=jesp> (Accessed).
- [28] Jin, Y., & Rider, M. (2010). Fiscal Decentralization, Fiscal Equalization, and Economic Growth: A Comparative Study of China and India. *Draft - not distributed*. India: The Delhi Centre of Indian Statistical Institute. http://www.isid.ac.in/~pu/conference/dec_10_conf/Papers/MarkRider.pdf (Accessed).
- [29] Kemenkes RI. (2010)
- [30] Kementerian Keuangan. (2010). *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Indonesia, 2001–2010*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- [31] Kim, E., Hong, S. W., & Ha, S. J. (2003). Impacts of National Development and Decentralization Policies on Regional Income Disparity in Korea. *The Annals of Regional Science*, 37 (1), 79–91.
- [32] KPPOD. (2002). *Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota di Indonesia*. Jakarta: Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah.
- [33] Kuncoro, M. (2004). *Otonomi & Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- [34] Kuncoro, M. (2006). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan. Edisi Keempat*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan - Akademi Manajemen Perusahaan UPP STIM YKPN.
- [35] Kuncoro, M. (2007). *Ekonomika Industri Indonesia: Menuju Negara Industri Baru, 2030?* Yogyakarta: Andi.
- [36] Lessmann, C. (2009). Fiscal Decentralization and Regional Disparity: Evidence from Cross-section and Panel Data. *Environment and Planning*, 41 (10), 2455–2473.
- [37] Lin, J. Y., & Liu, Z. (2000). Fiscal Decentralization and Economic Growth in China. *Economic Development and Cultural Change*, 49 (1) 1–21.
- [38] Litvack, J., Ahmad, J., & Bird, R. (1998). Rethinking Decentralization in Developing Countries. *Sector Studies Series*. Washington, D.C.: The International Bank for Reconstruction and Development. World Bank. <http://www1.worldbank.org/publicsector/decentralization/Rethinking%20Decentralization.pdf> (Accessed).
- [39] Martínez-Vásquez, J., & McNab, R. M. (2006). Fiscal Decentralization, Macrostability, and Growth. *Hacienda Pública Española/Revista de Economía Pública*, 179 (4), 25–49.
- [40] Martínez-Vásquez, J., & Timofeev, A. (2010). Decentralization Measures Revisited. *Public Finance and Management*, 10 (1), 13–47
- [41] Musgrave, R., & Musgrave, P. (1989). *Public Fi-*

- nance in Theory and Practice. *International Edition*. Singapore: McGraw-Hill.
- [42] Nugrahanto, A. S., & Muhyiddin. (2008). Fiscal Decentralization and Regional Inequality in Indonesia 2001–2004. *Journal of Development Planning*, 1 (14), 1–19.
- [43] Nugraheni, D., & Priyarsono D.S. (2012). Kinerja Keuangan Daerah, Infrastruktur, dan Kemiskinan: Analisis Kabupaten/Kota di Indonesia 2006–2009. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 12 (2), 148–167.
- [44] Oates, W. E. (1972). *Fiscal Federalism*. New York: Harcourt Brace Jovanovich.
- [45] Oates, W. E. (1993). *Fiscal Decentralization and Economic Development*. *National Tax Journal*, 46 (2), 237–243.
- [46] Pepinsky, T. B., & Wihardja, M. M. (2009). Decentralization and Economic Performance in Indonesia. *Journal of East Asian Studies*, 11 (3), 337–371.
- [47] Qiao, B., Martínez-Vásquez, J., & Xu, Y. (2002). Growth and Equity Tradeoff in Decentralization Policy: China's Experience. *International Studies Program Working Paper*, 02-16. Atlanta, U. S.: International Studies Program, Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University. <http://icepp.gsu.edu/sites/default/files/documents/icepp/wp/ispwp0216.pdf> (Accessed
- [48] Rodríguez-Pose, A., & Ezcurra, R. (2010). Does Decentralization Matter for Regional Disparities? A Cross-Country Analysis. *Journal of Economic Geography*, 10 (5), 619–644.
- [49] Rodríguez-Pose, A., & Gill, N. (2004). Is There a Global Link between Regional Disparities and Devolution? *Environment and Planning*, 36 (12), 2097–2117.
- [50] Samimi, A. J., Lar, S. K. P., Haddad, G. K., & Alizadeh, M. (2010). Fiscal Decentralization and Economic Growth in Iran. *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, 4 (11), 5490–5495.
- [51] Setiaji, W., & Adi, P. H. (2007). Peta Kemampuan Keuangan Daerah Sesudah Otonomi Daerah: Apakah Mengalami Pergeseran? (Studi Pada Kabupaten dan Kota se Jawa–Bali). *Simposium Nasional Akuntansi X*. Unhas Makassar 26–28 Juli 2007.
- [52] Shankar, R., & Shah, A. (2003). Bridging the Economic Divide Within Countries: A Scorecard on the Performance of Regional Policies in Reducing Regional Income Disparities. *World Development*, 31 (8), 1421–1441.
- [53] Silva, E. G., & Teixeira, A. C. C. (2008). Surveying Structural Change: Seminal Contributions and a Bibliometric Account. *Structural Change and Economic Dynamics*, 19 (4), 273–300.
- [54] Sjafrizal. (2008). *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Padang: Baduouse Media.
- [55] Suwanan, A. F., & Sulistiani, E. H. (2009). Fiscal Decentralization and Regional Disparities in Indonesia; A Dynamic Panel Data Evidence. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 24 (3), 328–336.
- [56] Tambunan, T. (2001). *Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- [57] Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *Economic Development*, 9th edition. London: Pearson Education Ltd.
- [58] Valli, V., & Saccone, D. (2009). Structural Change and Economic Development in China and India. *The European Journal of Comparative Economics*, 6 (1), 101–129.
- [59] Waluyo, J. (2007). Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antardaerah di Indonesia. *Simposium Nasional Ekonomi PPIE FE UI*, Wisma Makara-Kampus UI Depok, 12 Desember 2007.
- [60] Wellisch, D. (2004). *Theory of Public Finance in a Federal State*. Cambridge, U. K.: Cambridge University Press.
- [61] Wibowo, K. (2004). Lessons From Previous Taxes' Studies to Indonesian Local and Regional Governments After Fiscal Decentralization. *Working Papers in Economics and Development Studies*, 200402. Bandung: Department of Economics, Padjadjaran University. <http://lp3e.fe.unpad.ac.id/wopeds/200402.pdf> (Accessed
- [62] Widhiyanto, I. (2008). Fiscal Decentralization and Indonesia Regional Income Disparity (1994-2004). *Jurnal Keuangan Publik*, 5 (1), 19–53.
- [63] Williamson, J. G. (1965). Regional Inequality and The Process of National Development: A Description of The Patterns. *Economic Development and Cultural Change*, 13 (4), 1–84.
- [64] Zhang, T., & Zou, H. (1998). Fiscal Decentralization, Public Spending, and Economic Growth in China. *Journal of Public Economics*, 67 (2), 221–240.

Tabel 1: Lampiran 3: Variabel dan Definisi Operasional

Variabel	Konsep Variabel	Satuan	Sumber
Pegeseran Sektor (SC)	Merupakan nilai share sektor terhadap perekonomian daerah yang menunjukkan nilai negatif dan positif. Bila nilainya negatif menunjukkan penurunan share dan sebaliknya. Nilai indeks antara 0-100	-	Hasil Perhitungan $SCI = \frac{1}{2} \sum X_t - X_{t-1} $
Pendapatan Per Kapita Masyarakat (PDRB/Cap)	Pendapatan per kapita atau pendapatan per kepala adalah pendapatan penduduk kabupaten/kota yang dihitung rata-rata setiap tahun. Proksinya adalah PDRB per kapita diperoleh dari perbandingan antara jumlah PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, yang mencerminkan pendapatan penduduk suatu daerah setiap tahun	Rupiah/tahun	BPS
Populasi (Pop)	Populasi atau penduduk adalah jumlah seluruh penduduk dalam wilayah/daerah tertentu dalam satu tahun	Jiwa atau orang	BPS
Unemp	Pengangguran adalah jumlah orang yang belum bekerja atau sementara mencari pekerjaan pada usia angkatan kerja	Jiwa atau orang	BPS
Indeks Kapasitas Fiskal (IKF)	Indeks Kapasitas Fiskal merupakan ukuran kemampuan keuangan bagi daerah (kabupaten/kota) untuk membiayai kegiatan dan aktivitasnya	-	Hasil Perhitungan
Desentralisasi Fiskal (FD)	Desentralisasi penerimaan yang diukur dari rasio penerimaan sendiri (PAD) terhadap total penerimaan di luar penerimaan provinsi pada wilayah yang bersangkutan	Rupiah/tahun	Salah satu indikator yang digunakan oleh Akai dan Sakata (2002)
Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antardaerah (Ineq)	Perbedaan posisi relatif produktivitas ekonomi antarwilayah yang dinyatakan dalam nilai indeks di wilayah kabupaten/kota	-	Hasil perhitungan ketimpangan relatif (Qiao <i>et al.</i> , 2002)
Desentralisasi Fiskal (FD)	Desentralisasi fiskal adalah rasio pendapatan sendiri terhadap total pendapatan masing-masing kabupaten/kota di luar penerimaan pemerintah provinsi (federal)	Rupiah/Tahun (%)	Indikator yang digunakan oleh Akai dan Sakata (2002)
Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antardaerah (Ineq)	Perbedaan posisi relatif produktivitas ekonomi antarwilayah yang dinyatakan dalam nilai indeks di wilayah kabupaten/kota	-	Hasil perhitungan ketimpangan relatif (Qiao <i>et al.</i> , 2002)
Tingkat Kemiskinan (POVER)	Kemiskinan merupakan orang-orang atau individu yang memiliki penghasilan rendah dan tidak mampu memenuhi standar kebutuhan hidupnya	Jiwa atau orang	BPS
Indeks Pembangunan Manusia (HDI)	Indeks Pembangunan Manusia adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia	-	BPS

Tabel 2: Lampiran 1: Hasil Kalkulasi SCI

Kabupaten/Kota	Nilai <i>Sectoral Change Index</i>									
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Bangkep	1,81	0,3	5,95	0,5	3,26	0,64	0,62	0,62	0,66	0,57
Banggai	0,9	2,81	7,63	0,64	0,52	0,09	0,08	0,14	0,33	3,52
Buol	0,74	0,36	5,93	0,66	0,58	0,83	0,64	0,61	0,52	0,41
Donggala	0	1,69	3,3	0,42	3,27	0,39	0,7	1,16	0,16	1,85
Morowali	0,16	0,64	1,09	0,11	1,52	2,12	2,24	0,79	0,1	0,8
Poso	0,22	1,63	4,03	0,36	3,22	0,34	0,13	0,06	0,1	0,15
Tolitoli	0,77	0,6	2,87	0,4	0,19	0,1	0,27	0,81	0,43	0,57
Palu	0,37	0,87	0,26	0,49	0,25	0,43	0,4	0,33	0,19	0,17

Sumber: Hasil Olahan Penulis, (2014)

Tabel 3: Lampiran 2: Hasil Penghitungan INEQ

Kabupaten/Kota	Nilai <i>Sectoral Change Index</i>									
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Bangkep	0,56	0,6	0,5	0,52	0,57	0,58	0,61	0,65	0,65	0,69
Banggai	0,45	0,15	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,55
Buol	0,33	0,4	0,37	0,37	0,47	0,49	0,53	0,59	0,6	0,65
Donggala	0,99	0,64	0,03	0,68	0,65	0,67	0,69	0,73	0,53	0,55
Morowali	0,01	0,06	0,13	0,12	0,16	0,15	0,17	0,25	0,25	0,38
Poso	0,55	0,25	0,59	0,13	0,15	0,3	0,4	0,49	0,51	0,61
Tolitoli	0,06	0,19	0,28	0,32	0,38	0,39	0,44	0,51	0,51	0,56
Palu	0,05	0,02	0,02	0,01	0,11	0,17	0,23	0,34	0,34	0,4

Sumber: Hasil Olahan Penulis, (2014)

Tabel 4: Persamaan Pergeseran Sektor

Koefisien	Nilai	Statistik t
LnPDRBCap	-1,255592	-3,144292***
Ln POP	-0,185976	-0,281081
Unemp	0,017117	0,385440
IKF	-1,041380	-2,313858*
FD	-0,372636	-1,671961*
Adj R-Squared	0,573	
F-Stat	3,106	
DW Stat	2,401	

Sumber: Hasil Pengolahan dengan Eviews, (2014)

Keterangan: * signifikan pada taraf 10%

** signifikan pada taraf 5%

*** signifikan pada taraf 1%

Tabel 5: Persamaan Ketimpangan Regional

Koefisien	Nilai	Statistik t
LnPDRBCap	0,258729	5,580913***
LnPOP	0,553737	7,933418***
POV	2,49E-06	4,013394***
HDI	-2,50E-06	-0,508341
UNEMP	-0,004760	-1,031044
FD	0,034457	2,464270**
Adj R-Squared	0,9319	
F-Stat	69,552	
DW Stat	1,1558	

Sumber: Hasil Pengolahan dengan Eviews, (2014)

Keterangan: * signifikan pada taraf 10%

** signifikan pada taraf 5%

*** signifikan pada taraf 1%